

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.11B.12.25.115 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 - 2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Tarakan tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI TARAKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI TARAKAN TAHUN 2025 - 2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai POM di Tarakan memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Tarakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Tarakan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Tarakan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI POM DI TARAKAN,



ISWADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.11B.12.25.115 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN
2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1.Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia aman, berkhasiat atau bermanfaat, serta bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam sistem kesehatan nasional, BPOM bertanggung jawab melaksanakan evaluasi yang ketat terhadap keamanan, mutu, dan efikasi produk sebelum diedarkan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap obat dan makanan yang beredar di pasar.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, BPOM didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. UPT berperan penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap sediaan farmasi—meliputi Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik—serta Pangan Olahan di wilayah kerjanya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab UPT selaras dengan visi dan misi BPOM dalam mewujudkan masyarakat yang terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta perubahannya. Berdasarkan peraturan tersebut, UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

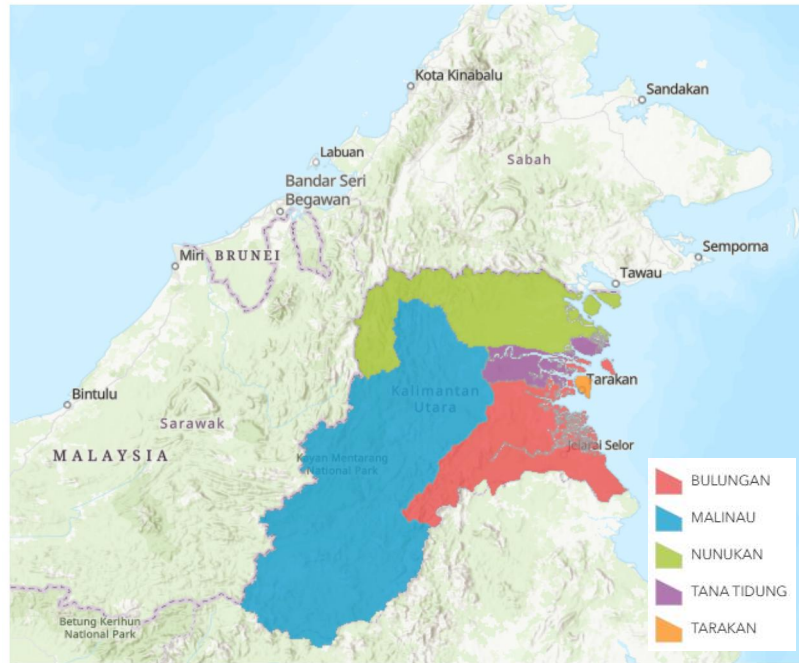
Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk serta fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai salah satu UPT, Balai POM di Tarakan memiliki wilayah kerja yang meliputi lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota

Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Gambar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

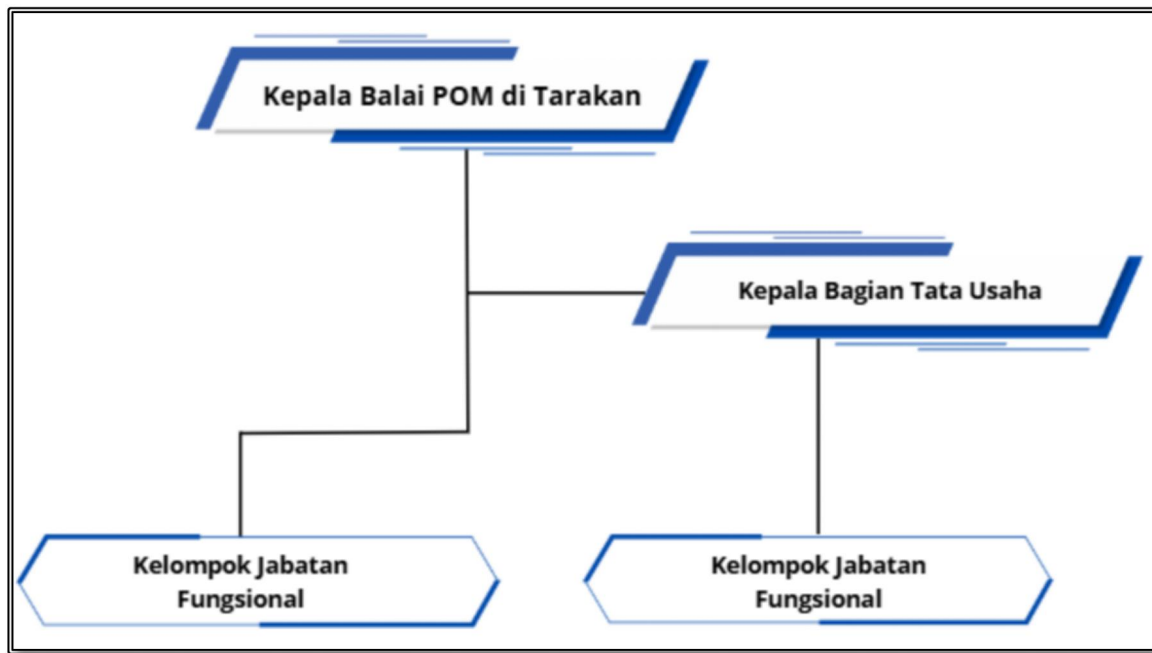


Wilayah kerja ini mencerminkan cakupan pengawasan yang luas serta tantangan geografis yang memerlukan perencanaan strategis dan tata kelola pengawasan yang efektif.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Balai POM di Tarakan terdiri dari:

- Kepala Balai POM di Tarakan,
- Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis pengawasan sesuai kompetensi masing-masing.

Gambar Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan



Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai POM di Tarakan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMN 2025 – 2029, Rencana Strategis BPOM 2025 – 2029, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

I.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024

Tabel 1.1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2021 - 2024 Balai POM di Tarakan

SASARAN KEGIATAN	IKU	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	T	93	90	90,5	91	92,5
		R	78,68	75,71	94,57	96,31	83,69
		%	85	84,12	104,50	105,84	90,48
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	T	78	81	82	84	86
		R	60,87	75	93,18	89,9	67,35
		%	78	92,59	113,63	107,02	78,31

SASARAN KEGIATAN	IKU	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	T	89	89,5	90	90,5	91
		R	75,51	56,16	98,67	95,1	76,92
		%	85	62,75	109,63	105,08	84,53
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	T	78	73	75	76	78,00
		R	55,56	87,5	72	79	81,82
		%	71	119,86	96,29	103,38	104,90
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	T	-	-	-	90	90,00
		R	-	-	-	100	96,88
		%	-	-	-	111,11	107,64
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	T	-	-	84	87	89,00
		R	-	-	73	89	91,11
		%	-	-	86,42	102,83	102,37
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	T	-	-	89,4	90,5	91,6
		R	-	-	93,3	96,7	97,8
		%	-	-	104,36	106,85	106,77
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat	T	-	-	80,63	82,82	85,01
		R	-	-	66,11	83,08	82,66
		%	-	-	81,99	100,31	97,24

SASARAN KEGIATAN	IKU	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
	dan Makanan						
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	T	-	-	88	89	90
		R	-	-	80,86	88,47	91,5
		%	-	-	91,89	99,40	101,67
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	T	88	100	100	100	100
		R	100	100	100	100	100
		%	114	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	T	62	85	88	92	95
		R	84,75	53,71	89,4	88,05	97,06
		%	137	63,19	101,59	95,71	102,17
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	T	85	100	100	100	100
		R	100	100	100	100	100
		%	118	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	T	47	50	55	60	65
		R	38,1	22,22	68,97	75,68	77,78
		%	81	44,44	125,40	126,13	119,66
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	T	60	74	76	78	80
		R	74,34	61,38	69,51	64,2	69,12
		%	124	82,95	91,46	82,31	86,40

SASARAN KEGIATAN	IKU	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik	T	-	-	3,01	3,25	3,51
		R	-	-	3,94	4,24	4,67
		%	-	-	130,90	130,46	133,05
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	T	-	-	61	63	65
		R	-	-	100	50	100
		%	-	-	163,93	79,37	153,85
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	T	-	-	-	-	-
		R	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	T	89,15	90,5	91,4	92,3	93,2
		R	89,87	92,26	92,37	92,11	93,01
		%	101	101,94	101,06	99,79	99,80
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	T	-	5	16	27	38
		R	-	5	16	29	39
		%	-	100,00	100,00	107,41	102,63
	Jumlah desa pangan aman	T	-	2	3	5	7
		R	-	2	3	5	7
		%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah pasar aman dari bahan	T	-	2	3	4	6
		R	-	2	3	4	5

SASARAN KEGIATAN	IKU	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
	berbahaya	%	-	100,00	100,00	100,00	83,33
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	T	50	50	100	100	100
		R	50,2	50	98,05	100	120
		%	100	100,00	98,05	100,00	120,00
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	T	50	50	100	100	100
		R	50	50	100	100	120
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	T	89	91	92	94	95
		R	55	100	100	100	66,25
		%	62	109,89	108,70	106,38	69,74
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	T	-	-	77,1	78,8	80,6
		R	-	-	74,29	79,72	81,61
		%			96,36	101,17	101,25
	Nilai AKIP UPT	T	-	-	82,2	84,7	87,2
		R	-	-	75,99	77,38	78,84
		%	-	-	92,45	91,36	90,41
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	T	-	-	-	-	-
		R	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	T	75	86,5	86,75	87	87,25
		R	86,32	86,05	85,04	88,8	85,86
		%	115	99,48	98,03	102,07	98,41
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	T	-	-	25	30	35
		R	-	-	36,6	41,56	43,66
		%	-	-	146,40	138,53	124,74

SASARAN KEGIATAN	IKU	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
pengawasan obat dan makanan	sesuai standar GLP						
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	T	-	-	2,25	2,5	3
		R	-	-	2,78	2,9	3,6
		%	-	-	123,56	116,00	120,00
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	T	-	90	90,6	91,8	93
		R	-	85,48	89,85	89,9	90,83
		%	-	94,98	99,17	97,93	97,67
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	T	-	-	-	-	-
		R	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
	Nilai Pengelolaan BMN	T	-	-	-	-	-
		R	-	-	-	-	-
		%					
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	T	-	-	-	-	-
		R	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-

Pengukuran kinerja Balai POM di Tarakan mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tarakan. Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai POM di Tarakan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Sampai dengan periode berakhirnya Renstra, Balai POM di Tarakan memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSK) sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Komoditas/ produk yang diawasi Balai POM di Tarakan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasantidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Tarakan merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap

pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah - kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Tarakan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan makanan aman dan bermutu.**

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Balai POM di Tarakan memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Tarakan, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Tarakan bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Balai POM di Tarakan mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Tarakan mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Oleh karena itu, pengawasan Obat dan Makanan seharusnya di desain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan

akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
- 2) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- 6) Indeks Pelayanan Publik
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi standar.

5. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Balai POM di Tarakan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan;
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman;

- 3) Jumlah desa pangan aman;
- 4) Jumlah pasar aman berbasis komunitas.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Tarakan mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai POM di Tarakan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Tarakan menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus - modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Tarakan melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) persentase penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020 - 2024, Balai POM di Tarakan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Tarakan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsistenditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Balai POM di Tarakan berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian RB meliputi penilaian RB dan SAKIP. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Tarakan untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Tarakan, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tarakan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem

dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Tarakan;
- 2) Nilai AKIP Balai POM di Tarakan.

9. Terwujudnya SDM wilayah Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak organisasi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/ modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) polakarir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi - mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.**

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai POM di Tarakan dalam pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice (GLP)* serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan

pengawasan di era *internet of things*. Selain hal tersebut diatas, aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Ketersediaan data dan informasi yang terkini dan akurat, mutlak dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini yang ada di masyarakat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tarakan yang optimal.

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Tarakan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran kegiatan ke - 11, dengan ukuran keberhasilan indikator kinerja utama Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan.

I.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, Balai POM di Tarakan senantiasa berupaya menyesuaikan arah kebijakan dan strategi pengawasan obat dan makanan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan menjadi unsur penting dalam proses perencanaan strategis, karena memberikan gambaran nyata mengenai harapan,

tantangan, serta potensi yang perlu diakomodasi dalam periode Renstra 2025 – 2029.

Stakeholder menyampaikan bahwa Balai POM di Tarakan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan di wilayah Kalimantan Utara. Namun demikian, kemampuan Balai POM di Tarakan saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah pengawasan, terutama di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan Indonesia–Malaysia. Kapasitas laboratorium yang masih terbatas juga menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengujian terhadap seluruh produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Utara.

Selain itu, pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah dengan keterbatasan akses belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Stakeholder berharap agar ke depan Balai POM di Tarakan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian sampel pihak ketiga, baik yang berasal dari Dinas Kesehatan (terkait KLB), Polda Kaltara dan Polres, maupun BNN dalam rangka pengujian sampel yang diduga mengandung narkotika.

Aspirasi dan masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tarakan untuk periode Renstra 2025–2029. Pada periode tersebut, Balai POM di Tarakan akan berupaya memperkuat kapasitas laboratorium, memperluas jangkauan pengawasan hingga ke wilayah terpencil dan perbatasan, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah.

Balai POM di Tarakan memahami bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan fungsi yang bersifat dinamis dan menuntut adanya adaptasi, inovasi, serta kolaborasi berkelanjutan. Perubahan lingkungan strategis, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat menuntut lembaga ini untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis bukti.

Dalam konteks tersebut, aspirasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masukan dan partisipasi aktif masyarakat membantu Balai POM di Tarakan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan publik, serta memperkuat kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat juga berperan sebagai mitra strategis melalui peningkatan kesadaran dan perilaku sebagai konsumen yang cerdas dan kritis, sehingga turut mendukung terwujudnya sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Balai POM di Tarakan juga menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat merupakan faktor strategis yang perlu direspons dalam pelaksanaan pengawasan di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap aspirasi dan masukan stakeholder akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Tarakan Tahun 2025–2029, sebagai dasar dalam membangun sistem pengawasan yang modern, partisipatif, dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, Balai POM di Tarakan berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan semangat sinergi dan keterbukaan terhadap aspirasi, Balai POM di Tarakan siap menyongsong periode Renstra 2025–2029 sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas jangkauan pengawasan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

I.2.Potensi dan Permasalahan

Dalam periode 2025–2029, Balai POM di Tarakan menghadapi berbagai potensi dan tantangan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) guna memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat

dirumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk obat serta makanan di wilayah Kalimantan Utara, Balai POM di Tarakan memikul tanggung jawab besar dalam memastikan masyarakat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pengawasan produk dalam negeri, tetapi juga dengan perubahan global seperti kemunculan penyakit baru (emerging diseases) dan perkembangan teknologi yang menuntut sistem pengawasan yang adaptif serta tanggap terhadap dinamika kesehatan nasional dan internasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tarakan 2025–2029 diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut melalui perumusan strategi pengawasan yang komprehensif, efektif, dan inovatif. Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang ada menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada keberlanjutan sistem pengawasan yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman utama bagi Balai POM di Tarakan dalam memperkuat kapasitas pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan publik di masa mendatang. Dengan strategi yang terarah, Balai POM di Tarakan dapat memastikan implementasi pengawasan yang semakin berkualitas, efektif, dan mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, serta terjangkau.

Selain itu, pengintegrasian potensi dan penanganan permasalahan yang dihadapi juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kesehatan. Strategi yang disusun perlu

mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih baik serta mengantisipasi ancaman kesehatan di masa depan. Melalui pendekatan kolaboratif dan holistik, Balai POM di Tarakan diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Dengan demikian, Renstra Balai POM di Tarakan 2025–2029 bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga representasi komitmen lembaga dalam menjawab dinamika dan tantangan global, memperkuat sistem pengawasan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia.

I.2.1. Kekuatan (Strength)

Analisis terhadap kondisi internal Balai POM di Tarakan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki organisasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Proses ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sumber daya, kemampuan, serta faktor strategis yang ada dapat menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan lembaga.

Pemahaman terhadap kekuatan internal sangat penting tidak hanya untuk menjaga efektivitas sistem pengawasan yang telah berjalan, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah pengembangan strategis di masa mendatang. Dengan mengetahui keunggulan yang dimiliki, Balai POM di Tarakan dapat memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Kekuatan yang teridentifikasi menjadi aset penting bagi Balai POM di Tarakan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan daya saing organisasi di tingkat regional maupun nasional. Faktor-faktor tersebut akan menjadi landasan bagi penyusunan strategi pengawasan

yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung visi Balai POM di Tarakan menuju sistem pengawasan yang unggul dan terpercaya.

Berikut merupakan beberapa kekuatan utama yang dimiliki Balai POM di Tarakan dan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya:

I.2.1.1. Pegawai di BPOM Tarakan telah menerapkan core value ASN

Ber - Akhlak

Sumber daya manusia di Balai POM di Tarakan telah menunjukkan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku kerja yang menumbuhkan budaya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Melalui penerapan nilai BerAKHLAK, pegawai Balai POM di Tarakan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, menjaga akuntabilitas dalam setiap proses kerja, serta meningkatkan kompetensi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis. Selain itu, semangat kolaborasi dan keharmonisan antarpegawai terus ditumbuhkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

Implementasi nilai BerAKHLAK tidak hanya memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga menjadi landasan moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Balai POM di Tarakan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK, Balai POM di Tarakan telah melaksanakan survei terhadap seluruh pegawai untuk mengukur tingkat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pegawai memiliki tingkat pemahaman yang sangat

baik terhadap Core Values ASN BerAKHLAK, dengan nilai rata-rata sebesar 97,07 dari skor maksimal 100

Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai Balai POM di Tarakan telah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hasil survei tersebut juga menjadi indikasi positif bahwa budaya kerja berbasis nilai telah tumbuh dan menjadi bagian dari etos kerja di lingkungan Balai POM di Tarakan.

Dengan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap nilai-nilai BerAKHLAK, diharapkan seluruh pegawai dapat terus menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berintegritas.

I.2.1.2. Peningkatan pelayanan publik Balai POM di Tarakan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Balai POM di Tarakan secara konsisten melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi dan penguatan tata kelola yang berkelanjutan. Peningkatan ini diarahkan untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Balai POM di Tarakan telah meluncurkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan efektivitas pengawasan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Salah satu inovasi unggulan adalah SOBAT Kaltara (Sosialisasi di Speedboat Kalimantan Utara), sebuah program sosialisasi kreatif yang dilakukan dengan memanfaatkan transportasi laut untuk menjangkau daerah-daerah pesisir dan perbatasan yang sulit diakses. Melalui kegiatan ini, masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh

edukasi mengenai keamanan obat dan makanan secara langsung, interaktif, dan tepat sasaran.

Selain itu, inovasi SERGAP UMKM (Sertifikasi Tanggap UMKM) juga telah diterapkan sebagai upaya proaktif dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu pangan olahan. Program ini tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi serta pentingnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Melalui berbagai inovasi tersebut, Balai POM di Tarakan berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pelayanan publik, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta membangun budaya pelayanan yang profesional dan berintegritas. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan mampu memperkuat peran Balai POM di Tarakan dalam melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.

Konsistensi dalam peningkatan mutu pelayanan publik tersebut tercermin dari hasil Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan nilai indeks ini menandakan bahwa berbagai upaya perbaikan dan inovasi telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Data realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai POM di Tarakan
Tahun 2022 - 2024

Tahun	Nilai Indeks Pelayanan Publik
2022	3,94
2023	4,24
2024	4,67

Secara umum, peningkatan nilai indeks dari 3,94 pada tahun 2022 menjadi 4,67 pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik Balai POM di Tarakan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan terpercaya.

Ke depan, Balai POM di Tarakan berkomitmen untuk terus memperkuat budaya pelayanan prima dengan mengedepankan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, memperluas inovasi berbasis digital, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor guna memberikan pelayanan publik yang unggul, adaptif, dan berintegritas.

I.2.1.3. Menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor

Menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor adalah salah satu kunci sukses Balai POM di Tarakan dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan demi melindungi kesehatan masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Balai POM di Tarakan secara konsisten telah menjaga dan memperkuat hubungan baik serta sinergi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) lintas sektor.

Hubungan yang terjalin harmonis ini mencakup instansi pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan, dinas kesehatan, dinas perdagangan, organisasi profesi, hingga pelaku usaha dan akademisi. Koordinasi yang intensif yang telah dilakukan pada akhirnya berdampak positif pada:

1. Kolaborasi yang solid dengan aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan Balai POM di Tarakan dalam menjaga keamanan obat dan makanan. Sepanjang periode Rencana Strategis (Renstra) 2021–2024, kemitraan strategis dengan institusi penegak hukum telah menghasilkan capaian yang optimal.

Berkat dukungan aktif dan sinergi dari Polda Kalimantan Utara (Kaltara), Kejaksaan Tinggi, dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), sebagian besar target penanganan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan berhasil dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Gambar Koordinasi Kepala Balai POM di Tarakan dengan Kapolda Kalimantan Utara



Gambar Koordinasi Kepala Balai POM di Tarakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi



Sinergi ini memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tegas, cepat, dan terpadu, mulai dari proses penyidikan oleh PPNS Balai POM hingga proses penuntutan di pengadilan. Keberhasilan ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan efek jera dan melindungi masyarakat dari produk berbahaya.

Balai POM di Tarakan menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta lingkungan sekolah mengenai keamanan obat dan makanan. Melalui fungsi informasi dan komunikasi (Infokom), Balai POM di Tarakan secara berkesinambungan mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di berbagai perguruan tinggi, serta melaksanakan sosialisasi yang melibatkan pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Tarakan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi produk obat dan makanan yang aman serta bermutu.

Gambar Pelaksanaan Sosialisasi dalam Rangka Pembinaan dan Krida Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan



Gambar Pelaksanaan Sosialisasi tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait obat dan makanan yang digelar bersama Universitas Borneo Tarakan



Percepatan Layanan Publik: Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kemudahan berusaha dan pengurusan perizinan bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

Gambar Koordinasi Kepala Balai POM di Tarakan dengan Kepala DMPTSP Kab. Bulungan



Pendekatan proaktif dan kemitraan strategis yang telah dijalin selama lima tahun ini memastikan bahwa pengawasan dan perlindungan konsumen di wilayah Tarakan berjalan secara komprehensif, terintegrasi, dan berdampak maksimal.

I.2.1.4. Penguatan kelembagaan Balai POM di Tarakan

Balai POM di Tarakan terus berupaya memperkuat kelembagaan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara. Penguatan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi struktur organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga memperluas jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna memperkuat sinergi lintas sektor. Upaya penguatan kelembagaan ini diharapkan mampu mewujudkan organisasi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan pengawasan obat dan makanan di masa mendatang.

I.2.1.5. Pemberian reward kepada pegawai Balai POM di Tarakan

Salah satu aspek kekuatan Balai POM di Tarakan terletak pada penerapan sistem penghargaan (reward) bagi pegawai yang menunjukkan kinerja unggul dan berkontribusi positif terhadap organisasi.

Gambar Pemberian Reward kepada Pegawai



Pemberian reward ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme pegawai, tetapi juga berfungsi sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja individu maupun tim. Melalui mekanisme penghargaan yang transparan dan objektif, Balai POM di Tarakan berhasil menumbuhkan budaya kerja yang kompetitif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Hal ini berdampak pada meningkatnya semangat kerja, loyalitas pegawai, serta terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

I.2.2. Kelemahan (Weakness)

Secara umum, kelemahan mencerminkan faktor-faktor internal yang dapat menghambat efektivitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Bagi Balai POM di Tarakan, pemahaman terhadap aspek kelemahan ini menjadi langkah penting dalam upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kelemahan dapat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum optimal, kemampuan manajerial yang masih perlu ditingkatkan, serta penerapan sistem kerja

yang belum sepenuhnya efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan lapangan.

Dengan melakukan identifikasi kelemahan secara menyeluruh, Balai POM di Tarakan dapat merumuskan langkah-langkah korektif dan strategi penguatan kelembagaan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Adapun beberapa kelemahan yang masih dihadapi oleh Balai POM di Tarakan meliputi:

I.2.2.1. Kinerja Balai POM di Tarakan yang belum optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan

Kinerja Balai POM di Tarakan masih menjadi kelemahan signifikan karena belum sepenuhnya optimal dalam mencapai seluruh target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi spesifik, beban kerja yang tinggi dibandingkan kapasitas yang tersedia, serta keterbatasan dukungan sarana dan prasarana di lapangan. Selain itu, dinamika regulasi dan kebijakan yang terus berubah menuntut kemampuan adaptasi yang cepat, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sering menghadapi tantangan dalam menjaga efektivitas.

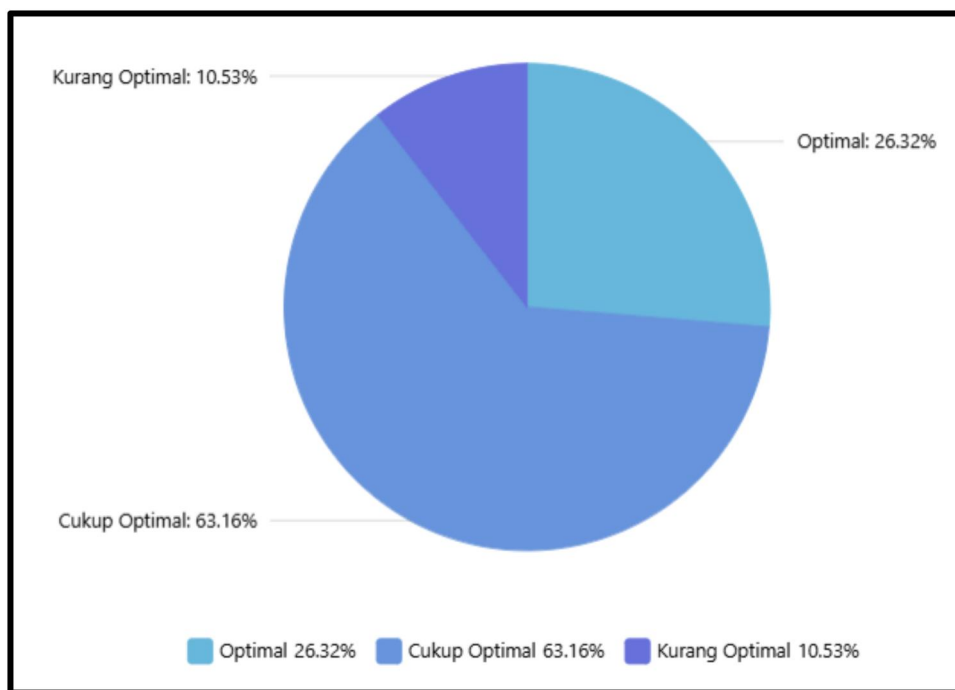
Kelemahan dalam kinerja ini berdampak pada terbatasnya pencapaian target strategis, potensi keterlambatan program, dan pengawasan yang kurang optimal di beberapa wilayah kerja, terutama yang terpencil atau sulit dijangkau. Tanpa langkah perbaikan yang terencana, efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dapat terhambat, mengurangi kemampuan Balai POM untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Meskipun upaya evaluasi dan perbaikan terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal, penguatan kapasitas pegawai, serta optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kelemahan kinerja ini tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar Balai POM di Tarakan dapat meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan dan mencapai target dengan lebih konsisten.

I.2.2.2. Jumlah SDM dan kompetensi pegawai yang belum memadai

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) serta kompetensi pegawai yang belum sepenuhnya memadai merupakan salah satu kelemahan utama yang memengaruhi efektivitas Balai POM di Tarakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kondisi ini semakin terasa dalam upaya menjangkau wilayah kerja yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam dan menantang. Jumlah pegawai yang masih terbatas menyebabkan pembagian beban kerja menjadi kurang proporsional, sementara kebutuhan akan tenaga dengan keahlian spesifik di bidang laboratorium, inspeksi, dan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi.

Gambar Grafik Kompetensi Pegawai Balai POM di Tarakan Tahun 2024



Hasil penilaian kompetensi pegawai tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 26,32 persen pegawai yang memiliki kompetensi optimal, 63,16 persen tergolong cukup optimal, dan 10,53 persen masih belum optimal. Data ini mencerminkan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan aspek krusial yang perlu segera mendapat perhatian, terutama untuk menjawab kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks.

Selain itu, dinamika perkembangan regulasi, kemajuan teknologi, serta pola peredaran produk obat dan makanan yang terus berubah menuntut kemampuan adaptasi dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Tanpa dukungan pengembangan SDM yang memadai, pegawai berisiko mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan tantangan baru, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta penataan formasi pegawai menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan. Tanpa upaya perbaikan tersebut, keterbatasan SDM berpotensi menghambat kinerja organisasi, membatasi jangkauan kegiatan pengawasan di lapangan, serta menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara.

I.2.2.3. Terbatasnya anggaran untuk pengembangan unit kerja

Keterbatasan anggaran menjadi kelemahan signifikan yang membatasi kemampuan Balai POM di Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional, pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, maupun perluasan jangkauan pengawasan ke daerah terpencil. Hal ini menyebabkan sejumlah program strategis, termasuk advokasi lintas sektor, peningkatan kapasitas laboratorium, dan inovasi layanan publik, sulit dilaksanakan secara maksimal.

Kondisi anggaran yang terbatas berdampak langsung pada terbatasnya fleksibilitas organisasi, mengurangi kemampuan Balai POM untuk merespons kebutuhan pengawasan yang dinamis, dan berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan di lapangan. Tanpa dukungan dana yang memadai, pengembangan kapasitas pegawai dan modernisasi fasilitas juga terhambat, sehingga kinerja organisasi tidak dapat mencapai potensi optimalnya.

Akibatnya, keterbatasan anggaran menjadi bottleneck utama yang dapat menghambat pencapaian target, membatasi ruang gerak organisasi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik dalam pengawasan obat dan makanan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

I.2.2.4. Keterbatasan sarana prasarana perkantoran

Keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran menjadi kelemahan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tarakan. Fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, termasuk ruang kerja, peralatan administrasi, kendaraan operasional, serta kapasitas laboratorium dan gudang penyimpanan sampel, sering menjadi kendala dalam mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pelayanan publik.

Keterbatasan sarana ini mengurangi fleksibilitas operasional, terutama ketika mobilitas tinggi diperlukan untuk pengawasan di wilayah terpencil, perbatasan, atau daerah sulit dijangkau. Kapasitas laboratorium dan gudang yang terbatas juga berpotensi memperlambat proses pemeriksaan sampel, menghambat ketepatan waktu pengambilan keputusan, dan membatasi jumlah kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan secara bersamaan.

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, laboratorium yang memadai dan berstandar internasional mutlak diperlukan. Hasil pengujian yang valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menjadi dasar utama dalam melakukan tindak lanjut pengawasan demi

perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan gedung existing, sehingga sarana dan prasarana laboratorium masih belum lengkap. Beberapa peralatan laboratorium, meubelair, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia secara menyeluruh.

Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM, serta pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, seperti peralatan, meubelair, metoda analisa, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang, terus dilakukan secara berkesinambungan. Upaya ini bertujuan untuk mengawal produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Tarakan diharapkan mampu menguji seluruh produk yang telah memiliki izin edar. Namun, sampai saat ini belum semua produk dapat diuji, sehingga hal ini menjadi tantangan utama bagi Balai POM untuk memastikan mutu, keamanan, dan khasiat obat serta makanan yang beredar.

Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana menjadi prioritas strategis untuk mendukung kinerja Balai POM di Tarakan. Dengan fasilitas yang memadai, produktivitas pegawai dapat meningkat, jangkauan layanan diperluas, dan pelayanan publik diberikan secara lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Tanpa perbaikan infrastruktur ini, efektivitas pengawasan dan kemampuan Balai POM dalam melindungi masyarakat tetap akan terbatas.

I.2.2.5. Pedoman pengawasan di perbatasan yang masih belum jelas

Salah satu kelemahan utama yang dihadapi Balai POM di Tarakan adalah belum adanya pedoman pengawasan yang jelas dan spesifik di wilayah perbatasan. Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara memiliki tantangan unik dalam mengawasi peredaran obat dan makanan lintas negara. Ketidakjelasan pedoman atau acuan teknis menyebabkan potensi tumpang tindih kewenangan, terbatasnya

koordinasi lintas instansi, dan kesulitan dalam menegakkan pengawasan secara konsisten dan efektif.

Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya risiko masuknya produk ilegal atau tidak terdaftar melalui jalur perbatasan yang sulit diawasi. Selain itu, lemahnya pedoman membuat upaya pembinaan dan penegakan hukum menjadi kurang terarah, sehingga pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pedoman dan penguatan koordinasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan pengawasan di perbatasan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa regulasi dan panduan yang jelas, Balai POM di Tarakan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif, sekaligus berpotensi mengurangi perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk obat dan makanan yang tidak aman.

I.2.3. Peluang (Opportuntiy)

Opportunity atau kesempatan menggambarkan berbagai faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk memperkuat kinerja, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Bagi Balai POM di Tarakan, berbagai peluang yang muncul dari lingkungan eksternal menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara.

Kesempatan tersebut antara lain berupa dukungan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap peningkatan mutu pelayanan publik dan penguatan sistem pengawasan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk melakukan transformasi digital dalam proses pengawasan, pelaporan, serta pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan obat dan

makanan juga menjadi momentum bagi Balai POM di Tarakan untuk memperluas kegiatan edukasi dan advokasi publik.

Di sisi lain, terbukanya ruang kerja sama lintas sektor dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas masyarakat turut menjadi peluang strategis dalam membangun sistem pengawasan yang lebih kolaboratif dan efektif. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara optimal, Balai POM di Tarakan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat perannya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan terlindungi dari produk obat dan makanan yang berisiko. Adapun peluang (opportunity) yang dimiliki Balai POM di Tarakan meliputi:

I.2.3.1. Koordinasi yang baik serta dukungan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan

Salah satu peluang strategis utama bagi Balai POM di Tarakan adalah terjalinnya koordinasi yang baik dan dukungan kuat dari berbagai pihak lintas sektor dalam upaya pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat menjadi faktor penunjang penting yang memungkinkan Balai POM memperkuat efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Melalui sinergi yang intensif dan komunikasi yang berkesinambungan, Balai POM di Tarakan memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pengawasan, mempercepat penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kualitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dukungan dari para stakeholder juga mempermudah pelaksanaan kegiatan lintas sektor, termasuk advokasi kebijakan, pengawasan bersama, dan pembinaan pelaku usaha, sehingga setiap upaya pengawasan menjadi lebih terkoordinasi, efisien, dan berdampak nyata.

Penguatan koordinasi dan dukungan lintas sektor ini merupakan peluang besar bagi Balai POM di Tarakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan

secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang solid, pengawasan dapat dilakukan secara terpadu, responsif, dan inovatif, memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat selalu aman, bermutu, dan bermanfaat, sekaligus memperkuat peran Balai POM sebagai mitra strategis dalam menjaga kesehatan dan keselamatan publik.

I.2.3.2. Ekspektasi dan target dari berbagai pihak terkait kinerja yang optimal BPOM Tarakan

Ekspektasi dan target yang tinggi dari berbagai pihak terhadap Balai POM di Tarakan justru menghadirkan peluang strategis untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Harapan ini datang dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang menginginkan pelayanan pengawasan obat dan makanan yang semakin cepat, akurat, dan berkualitas. Tekanan positif ini bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga motifator strategis bagi Balai POM untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan efisiensi proses kerja, dan memperkuat tata kelola organisasi agar mampu memenuhi tuntutan publik secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis untuk memanfaatkan peluang ini adalah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan profesional, penempatan personel sesuai keahlian, serta penerapan sistem kerja berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, Balai POM di Tarakan memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat koordinasi lintas bidang, dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pemanfaatan peluang ini secara strategis, Balai POM di Tarakan tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi yang tinggi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai lembaga pengawas yang profesional, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan publik, sekaligus menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan.

I.2.3.3. Perkembangan UMKM yang semakin meningkat

Meningkatnya jumlah dan aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kalimantan Utara menghadirkan peluang strategis yang signifikan bagi Balai POM di Tarakan untuk memperluas peran dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan UMKM yang pesat membuka ruang bagi Balai POM untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya dalam hal pendampingan, pembinaan, dan edukasi pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar regulasi.

Melalui berbagai program pendampingan, advokasi, serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Balai POM di Tarakan berperan aktif membantu UMKM dalam proses sertifikasi, pelabelan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta pemenuhan ketentuan regulasi keamanan obat dan makanan. Upaya ini tidak hanya memperkuat daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan inovatif.

Dengan memanfaatkan momentum peningkatan jumlah UMKM, Balai POM di Tarakan memiliki kesempatan untuk berperan sebagai mitra strategis pembangunan daerah, yang mendorong terciptanya ekosistem usaha berkualitas dan berorientasi pada keamanan serta mutu produk. Melalui kolaborasi yang erat dengan pelaku usaha, instansi pemerintah, dan masyarakat, Balai POM dapat memperkuat pengawasan berbasis pembinaan serta menjadi penggerak transformasi ekonomi lokal yang inovatif, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, pasar produk makanan di Kalimantan Utara yang terus berkembang turut memberikan peluang besar bagi Balai POM di Tarakan untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah dinamika pertumbuhan pasar ini, Balai POM di Tarakan berada pada posisi

strategis untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Situasi ini memberikan keuntungan ganda — konsumen memperoleh jaminan atas keamanan produk, sementara produsen mendapatkan kepastian berusaha dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Berdasarkan data, jumlah UMKM yang melakukan layanan konsultasi di Balai POM di Tarakan terus meningkat dari 129 UMKM pada tahun 2022, menjadi 207 pada tahun 2023, dan mencapai 291 pada tahun 2024. Tren peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan signifikan UMKM di wilayah Kalimantan Utara sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap peran Balai POM sebagai lembaga pembina dan pengawas.

Namun demikian, pertumbuhan yang pesat ini juga menuntut peningkatan kapasitas internal Balai POM, baik dari sisi kompetensi pegawai, penyediaan sarana dan prasarana layanan, maupun dukungan anggaran. Upaya penguatan ini penting agar kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM, yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap kemandirian bangsa.

I.2.3.4. Payung Hukum terkait pengawasan Obat dan Makanan

Adanya payung hukum yang jelas dan kuat dalam bidang pengawasan obat dan makanan menghadirkan peluang strategis yang signifikan bagi Balai POM di Tarakan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan regulasi yang kokoh di tingkat nasional maupun daerah, Balai POM memiliki landasan yang lebih mantap untuk menjalankan pengawasan secara efektif, terarah, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga setiap langkah pengawasan menjadi lebih terstruktur dan berdaya guna.

Penguatan regulasi yang terus diperbarui, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika pasar, memberikan kesempatan bagi Balai POM di Tarakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, inovasi pengawasan, dan perluasan jangkauan pengawasan ke seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kepastian hukum ini juga membuka peluang untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta menegaskan posisi Balai POM sebagai otoritas yang berwenang dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan.

Dengan dukungan regulasi yang berkelanjutan, Balai POM di Tarakan memiliki peluang besar untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan lebih optimal, konsisten, dan berkesinambungan. Kesempatan ini memungkinkan Balai POM tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan positif dalam terciptanya ekosistem pengawasan obat dan makanan yang modern, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

I.2.3.5. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan aman

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi obat dan makanan yang aman menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Tarakan dalam memperkuat efektivitas pengawasan. Dukungan dari berbagai stakeholder melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan bersama turut mendorong terciptanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) yang dilaksanakan bersama lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan berperan penting dalam membangun pemahaman publik tentang bahaya penggunaan produk ilegal

atau tidak terdaftar. Selain itu, kolaborasi pengawasan bersama juga memperkuat upaya pencegahan pelanggaran di lapangan.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan aktif dari para stakeholder, Balai POM di Tarakan memiliki peluang besar untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, serta manfaat obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara.

I.2.4. Ancaman (Threat)

Ancaman merupakan berbagai faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Bagi Balai POM di Tarakan, pemahaman terhadap aspek ancaman menjadi penting untuk mengantisipasi risiko dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat. Tantangan ini dapat muncul dari perubahan regulasi, dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, hingga perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keamanan obat dan makanan.

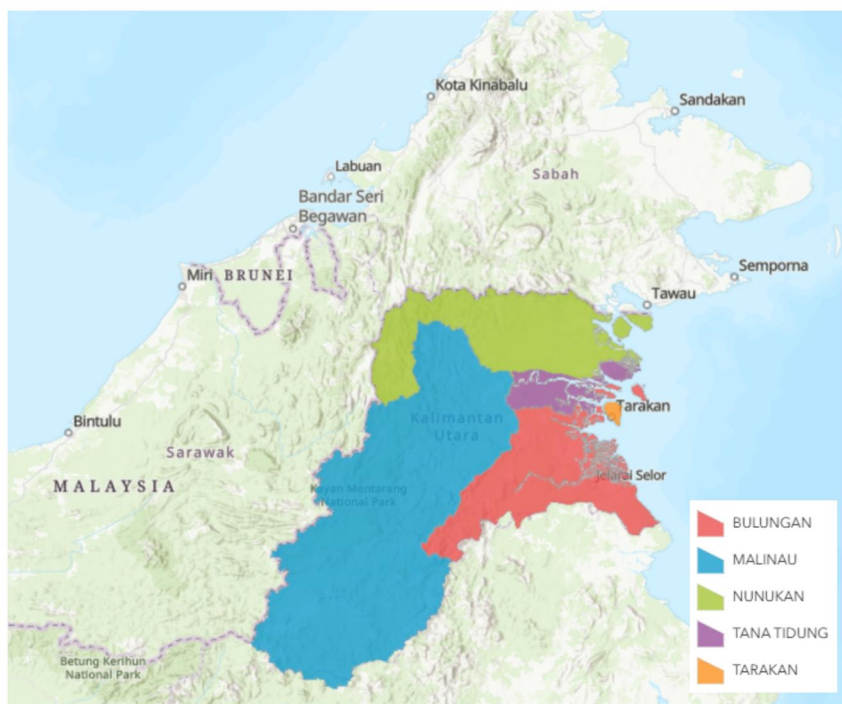
Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Utara yang terdiri dari wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh area pengawasan. Keterbatasan infrastruktur, peredaran produk ilegal lintas batas, serta potensi masuknya produk tanpa izin edar turut meningkatkan risiko terhadap keamanan masyarakat.

Melalui identifikasi dan analisis terhadap berbagai ancaman tersebut, Balai POM di Tarakan dapat merumuskan strategi pengawasan yang adaptif, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan kapasitas sumber daya agar tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun ancaman (threat) yang dimiliki Balai POM di Tarakan meliputi:

I.2.4.1. Kondisi Geografis, Sumber Daya Manusia, dan Perekonomian Kalimantan Utara

Wilayah kerja Balai POM di Tarakan meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri atas lima wilayah administratif, yaitu Kabupaten Malinau dengan ibu kota *Malinau*, Kabupaten Bulungan dengan ibu kota *Tanjung Selor* (yang juga merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara), Kabupaten Tana Tidung dengan ibu kota *Tideng Pale*, Kabupaten Nunukan dengan ibu kota *Nunukan*, Kota Tarakan dengan ibu kota *Tarakan*.

Gambar Peta Wilayah Provinsi Kalimantan



Kondisi geografis Kalimantan Utara menjadi tantangan sekaligus ancaman nyata bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tarakan. Wilayah pengawasan yang sangat luas, dengan karakteristik topografi yang sulit dan akses transportasi yang terbatas, menyebabkan kegiatan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh daerah. Beberapa lokasi seperti Long Bia, Long Beulah, Long Bang, Kecamatan Sebuku, dan Puskesmas Atap merupakan contoh nyata daerah dengan tingkat keterjangkauan rendah. Untuk mencapai wilayah

tersebut, petugas harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur darat dan laut, yang tidak hanya membutuhkan waktu dan biaya besar, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan kerja di lapangan.

Keterbatasan jumlah SDM semakin memperparah kondisi ini. Dengan cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas, jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan frekuensi dan intensitas pengawasan di daerah terpencil tidak dapat dilakukan secara rutin. Hal ini berpotensi menimbulkan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Selain faktor geografis dan SDM, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Utara yang masih berkembang turut menjadi ancaman tersendiri. Tingginya permintaan terhadap produk dengan harga murah tanpa memperhatikan aspek keamanan dan mutu meningkatkan risiko beredarnya produk berbahaya di pasaran. Fenomena ini diperburuk oleh masih maraknya peredaran produk pangan ilegal, yang menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa produk ilegal aman untuk dikonsumsi.

Secara keseluruhan, kombinasi antara tantangan geografis, keterbatasan SDM, dan kerentanan ekonomi masyarakat menjadikan situasi ini sebagai ancaman strategis bagi Balai POM di Tarakan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, penambahan tenaga pengawas, serta penguatan koordinasi lintas sektor, efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Utara akan sulit mencapai tingkat optimal.

Sebagai langkah mitigasi, Balai POM di Tarakan terus meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan mutu produk, serta bahaya konsumsi produk pangan ilegal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan mendukung terciptanya ekosistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Utara.

I.2.4.2. Kejahatan Obat dan Makanan baik melalui media sosial maupun yang dijual langsung

Maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, baik melalui media sosial maupun penjualan langsung, menjadi ancaman nyata bagi Balai POM di Tarakan dalam menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan selama periode 2022–2024, Balai POM di Tarakan telah menemukan lebih dari 150 jenis produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) yang beredar di wilayah Kalimantan Utara, dengan sebagian besar berasal dari penjualan daring melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan marketplace lokal.

Dari hasil pengawasan tersebut, sekitar 65% pelanggaran ditemukan di media sosial, sedangkan 35% lainnya berasal dari penjualan langsung di pasar tradisional, toko kelontong, serta warung di daerah perbatasan dan pedalaman. Beberapa produk yang sering ditemukan melanggar ketentuan antara lain kosmetika tanpa izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO), dan pangan olahan tanpa label yang jelas.

Situasi ini menjadi ancaman strategis karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, Balai POM di Tarakan terus memperkuat upaya cyber patrol, pengawasan terpadu lintas sektor, serta mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan. Dengan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait, diharapkan ancaman kejahatan obat dan makanan, baik secara daring maupun luring, dapat ditekan secara signifikan.

I.2.4.3. Pemahaman Masyarakat dan lintas sektor terkait Obat dan Makanan ilegal disertai dengan maraknya isu negatif (Hoax)

Rendahnya pemahaman masyarakat dan sebagian pihak lintas sektor tentang risiko obat dan makanan ilegal, dipadukan dengan penyebaran hoaks yang masif, bukan sekadar masalah informasi — melainkan ancaman langsung terhadap efektivitas tugas Balai POM di Tarakan. Hoaks dan informasi menyesatkan dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi, serta mendorong perilaku konsumsi yang berisiko; akibatnya upaya pengawasan, penindakan, dan pembinaan menjadi jauh lebih sulit dan menyita sumber daya.

Dampak ancaman ini bersifat multiplikatif: waktu dan tenaga yang seharusnya diprioritaskan untuk pengawasan dan penegakan harus dialihkan untuk klarifikasi dan penanganan isu-isu palsu; kerja sama lintas sektor menjadi kurang efektif ketika mitra dan publik terpengaruh disinformasi; serta potensi bahaya kesehatan meningkat karena masyarakat mengikuti klaim produk berbahaya atau tidak teruji. Semua kondisi ini berisiko menurunkan kredibilitas Balai POM di Tarakan dan melemahkan kemampuan unit kerja dalam melindungi kesehatan publik.

Dengan kata lain, maraknya hoaks dan rendahnya literasi terkait obat dan makanan adalah ancaman strategis yang secara langsung mengganggu fungsi, reputasi, dan hasil kerja Balai POM di Tarakan — dan perlu ditanggapi sebagai prioritas mitigasi kelembagaan.

I.2.4.4. Tingginya Permintaan Produk Luar Negeri oleh Masyarakat Perbatasan

Kedekatan geografis wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia, khususnya kawasan Nunukan dan Sebatik yang berhadapan langsung dengan Tawau - Malaysia, menciptakan pola interaksi sosial dan ekonomi yang sangat intens di masyarakat. Kondisi ini membentuk persepsi bahwa

produk-produk dari negara tetangga lebih mudah diperoleh, lebih bervariasi, dan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk yang beredar secara resmi di dalam negeri. Persepsi tersebut menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk luar negeri, termasuk produk obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

Tingginya permintaan ini berdampak langsung pada maraknya peredaran produk ilegal di kawasan perbatasan. Banyak konsumen memprioritaskan harga murah dan akses cepat tanpa mempertimbangkan keamanan, mutu, serta legalitas produk yang mereka konsumsi. Hal ini membuka ruang bagi pelaku penyelundupan untuk terus memasok barang-barang dari Malaysia melalui jalur tidak resmi, yang kemudian dijual bebas di pasar lokal maupun secara daring. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan produk tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya.

Minimnya ketersediaan produk legal tertentu di daerah perbatasan juga turut memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap barang-barang dari luar negeri. Ketika kebutuhan tidak dapat dipenuhi melalui jalur resmi, masyarakat cenderung mencari alternatif di pasar gelap yang lebih mudah diakses, meskipun tidak dijamin keamanan dan mutunya. Dengan demikian, tingginya permintaan produk luar negeri di wilayah perbatasan menjadi faktor signifikan yang memperkuat rantai pasar ilegal dan menghambat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan komunikasi risiko, edukasi publik, serta sinergi lintas sektor untuk menekan preferensi terhadap produk ilegal dan mendorong masyarakat beralih ke produk yang legal, aman, bermutu, dan bermanfaat.

I.2.4.5. Peredaran Produk Ilegal dari Lintas Batas yang Tinggi

Wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap masuknya produk Obat dan Makanan ilegal. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat dan barang yang melintasi perbatasan setiap hari, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi. Keberadaan jalur tikus, dermaga kecil tradisional, serta akses hutan dan sungai yang terhubung langsung dengan wilayah Malaysia menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memasukkan produk tanpa melalui proses pengawasan dan pemeriksaan yang seharusnya.

Kondisi ini sangat nyata terutama di wilayah Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, serta beberapa titik terpencil seperti Krayan yang secara geografis lebih dekat dengan Malaysia dibandingkan pusat pemerintahan di Indonesia. Masyarakat setempat umumnya memiliki ketergantungan terhadap produk-produk dari negara tetangga karena faktor kedekatan jarak, harga yang lebih murah, serta kemudahan akses. Pola konsumsi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memasukkan produk obat, kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan yang tidak terdaftar, tidak berlabel bahasa Indonesia, bahkan berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Penyelundupan produk ilegal biasanya dilakukan dalam jumlah kecil namun frekuensi tinggi (micro-smuggling), sehingga sulit terdeteksi melalui pengawasan biasa. Produk-produk tersebut kerap dibawa menggunakan perahu kecil, kendaraan roda dua, atau bahkan dijinjing langsung oleh individu yang melakukan perjalanan lintas batas. Selain itu, adanya pasar-pasar perbatasan dan interaksi ekonomi antarwarga negara (border trade) semakin memperbesar risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Masuknya produk tanpa izin edar dan tanpa melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat menimbulkan potensi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Produk obat dapat berupa obat keras

tanpa resep, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO), atau kosmetik yang mengandung merkuri dan hidrokuinon. Sementara itu, produk pangan olahan yang masuk sering kali tidak memiliki informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, serta tidak diproduksi sesuai standar BPOM. Kondisi ini meningkatkan risiko keracunan pangan, penyakit kronis, bahkan gangguan kesehatan jangka panjang.

Selain berdampak langsung pada kesehatan, maraknya peredaran produk ilegal juga memberikan dampak sistemik, antara lain melemahkan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan, menghambat penegakan hukum, merugikan pelaku usaha legal di wilayah Indonesia, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk yang beredar. Tantangan ini semakin berat dengan keterbatasan SDM pengawas, sarana penunjang, serta luasnya cakupan wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang meliputi lima Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.

Secara keseluruhan, tingginya peredaran produk ilegal lintas batas merupakan ancaman strategis yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan siber dan perbatasan, serta pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dan memenuhi ketentuan.

Tabel Matriks Ringkasan Analisis SWOT Balai POM di Tarakan

STRENGTHS	WEAKNESS
1. Pegawai di BPOM Tarakan telah menerapkan core value ASN Ber-Akhlak	1. Kinerja Balai POM di Tarakan yang belum optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan
2. Peningkatan pelayanan publik Balai POM di Tarakan	2. Jumlah SDM dan kompetensi pegawai yang belum memadai
3. Menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor	3. Terbatasnya anggaran untuk pengembangan unit kerja
4. Penguatan kelembagaan Balai POM di Tarakan	4. Keterbatasan sarana prasarana

5. Pemberian reward kepada pegawai Balai POM di Tarakan	perkantoran 5. Pedoman pengawasan di perbatasan yang masih belum jelas
OPPORTUNITIES 1. Koordinasi yang baik serta dukungan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan 2. Ekspektasi dan target dari berbagai pihak terkait kinerja yang optimal BPOM Tarakan 3. Perkembangan UMKM yang semakin meningkat 4. Payung Hukum terkait pengawasan Obat dan Makanan 5. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan aman	THREATS 1. Kondisi Geografis, SDM dan Perekonomian Kalimantan Utara 2. Kejahatan Obat dan Makanan baik melalui media sosial maupun yang dijual langsung 3. Pemahaman Masyarakat dan lintas sektor terkait Obat dan Makanan ilegal disertai dengan maraknya isu negatif 4. Tingginya Permintaan Produk Luar Negeri oleh Masyarakat Perbatasan 5. Peredaran Produk Ilegal dari Lintas Batas yang Tinggi

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPOM

2.1 VISI

Balai POM di Tarakan sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Tarakan sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi sebagaimana tersebut di atas demi mewujudkan visi BPOM. Dalam kerangka tersebut, perencanaan strategis Balai POM di Tarakan diarahkan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi, serta selaras dengan kebijakan nasional bidang kesehatan, reformasi birokrasi, dan pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, Balai POM di Tarakan berkomitmen memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, ketahanan obat dan pangan nasional, serta terbangunnya ekosistem pengawasan yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung

tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia.

Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai POM di Tarakan sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan yang Aman dan Bermutu	yang Aman dan Bermutu					
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Program/ Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Tarakan, dengan mempertimbangkan

tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Tarakan akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan

KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai

prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tarakan periode 2025 - 2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BPOM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Petugas pemeriksa menerima penolakan dari pelaku usaha distributor/retail pangan untuk tandatangan administrasi BA pemeriksaan	Melakukan tindakan persuasif kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan	Tim Kerja Pemeriksaan
		Terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan pembelian sampel	1. Sosialisasi Anti KKN oleh Kepala Balai pada saat Apel atau Rapat Internal 2. Sosialisasi ASN Berakhlak 3. Pencantuman nomor Kepala Balai POM Tarakan di ST untuk pengaduan	Tim Kerja Pemeriksaan
		Kualitas Hasil Uji tidak memenuhi standar	1. Penunjukkan PIC alat 2. Penyusunan Instruksi Kerja Alat 3. Monitoring penggunaan alat	Tim Kerja Pengujian
		Stok Reagen/Media Habis	Membuat Jadwal pelaksanaan Stock Opname (SO) Reagen dan Media	Tim Kerja Pengujian
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Pesan KIE tidak dipahami audiens	Merancang materi khusus segmentasi sasarannya dengan pendekatan sesuai usia, pendidikan, dan budaya lokal serta menggunakan media audio visual yang menarik	Tim Kerja Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Program pemberdayaan keamanan pangan (Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Intervensi PJAS) tidak direplikasi atau pengimbasan oleh pemerintah kabupaten/kota.	Melakukan pengawalan atau monitoring keberlanjutan program setelah intervensi	Tim Kerja Infokom
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha tidak dapat memenuhi seluruh aspek cara pembuatan obat dan makanan yang baik	Melaksanakan pendampingan lebih intensif dengan kunjungan ke sarana produksi ataupun melalui desk serta memberikan dorongan/motivasi	Tim Kerja Pemeriksaan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadi Gugatan PraPeradilan terhadap perkara yang ditangani oleh Balai POM di Tarakan	Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Kaltara dan Kejaksaan Tinggi Kaltara sebelum melakukan penyidikan	Tim Kerja Penindakan
		Terjadi demo atau aksi protes pelaku usaha dan penggiringan isu negatif terhadap penanganan produk pangan ilegal dari Malaysia	Melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat untuk dilakukan pengamanan	Tim Kerja Penindakan
		Terjadinya penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi kasus/perkara tidak di Pro Justicia / di proses hukum	1. Sosialisasi Anti KKN oleh Kepala Balai pada saat Rapat Internal 2. Sosialisasi ASN Berakhlak 3. Pencantuman nomor Kepala Balai POM Tarakan di ST untuk	Tim Kerja Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			pengaduan	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penggalangan lintas sektor cegah tangkal kejahatan di bidang obat dan makanan tidak terlaksana	Mengikutsertakan kegiatan penggalangan lintas sektor cegah tangkal kejahatan dalam kegiatan KIE Infokom, melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor sebagai bentuk penggalangan kejahatan obat dan makanan ilegal	Tim Kerja Penindakan
6	Layanan Publik UPT yang prima	Masih terdapat sarana prasarana pelayanan publik yang belum dapat dipenuhi sesuai ketentuan	1. Pengadaan sarana prasarana secara bertahap sesuai prioritas 2. Pemeliharaan rutin sarana prasarana pelayanan publik	Tim Kerja Infokom
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	1. Penerapan jadwal olahraga yang teratur 2. Pembagian tugas kerja yang merata 3. Pengadaan alat tensimeter	Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Kebakaran di Kantor Balai POM di Tarakan dan Laboratorium Balai POM di Tarakan	1. Ada sistem jaga di kantor BPOM Tarakan dan Laboratorium Tarakan, menyediakan APAR di Kantor BPOM Tarakan dan Laboratorium Tarakan dengan jumlah yang memadai 2. Pelatihan Alat Pemadam Kebakaran 3. Pengecekan Alat Pemadam Kebakaran secara berkala	Tata Usaha
		Penggunaan password yang lemah atau mudah ditebak oleh pengguna sistem	Sharing SE Kemanan TIK ke seluruh pegawai	Tata Usaha
		Terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan Balai POM di Tarakan	1. Sosialisasi Anti KKN oleh Kepala Balai pada saat Apel atau Rapat Internal 2. Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistleblower oleh Inspektorat 3. Sosialisasi ASN Berakhlak	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan

standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat

dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan

dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
--	---

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025 - 2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi/Satker

Bahwa Balai POM di Tarakan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Tarakan mendorong inovasi dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Tarakan memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kapasitas penindakan terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik melalui kanal daring (*online*) maupun secara

langsung di lapangan (*offline*) sesuai karakteristik wilayah pengawasan di Tarakan.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Balai POM di Tarakan memfokuskan peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat hilirisasi produk melalui mekanisme *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif melalui bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Tarakan mengedepankan keberpihakan pada UMKM guna memudahkan pemenuhan standar regulasi, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar, sehingga kontribusi pelaku usaha lokal terhadap perekonomian daerah dan nasional semakin optimal.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Balai POM di Tarakan memprioritaskan edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen utama untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi produk yang aman dan bermutu, termasuk pembiasaan perilaku membaca label informasi nilai gizi pada pangan olahan, agar masyarakat turut berperan aktif dalam menciptakan rantai peredaran produk yang aman.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Balai POM di Tarakan memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, baik pada tingkat nasional maupun internasional, untuk

menyatukan upaya dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Balai POM di Tarakan berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kualitas pengujian laboratorium, serta transformasi digital di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan organisasi tetap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: Balai POM di Tarakan memperkuat dukungan manajemen dalam mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk melalui peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Penguatan ini memastikan proses pengawasan dan pelayanan berlangsung secara efisien, transparan, akuntabel serta selaras dengan kebutuhan *stakeholder*.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Balai POM di Tarakan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif berbasis risiko, termasuk pengawasan terhadap produk dan sarana tanpa izin edar, serta memberikan dukungan terhadap

implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi farmakovigilans, mengoptimalkan peran unit teknis dalam pengawasan lapangan, dan menjalin kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah maupun instansi vertikal untuk memperlancar pengawasan sarana produksi dan distribusi. Selain itu, Balai POM di Tarakan terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap produk berizin edar, serta memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pencegahan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO). Upaya ini juga mencakup pemberdayaan Tim Gerak Cepat (TGC) KLB Keracunan Pangan baik yang ada diinternal Balai POM di Tarakan maupun yang ada lintas sektor guna memastikan respon cepat terhadap insiden keracunan pangan, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;

2. Pencegahan dan deteksi dini dalam menekan kejahatan distribusi ilegal sediaan farmasi dan pangan olahan, baik melalui kanal daring maupun luring. Penindakan diperkuat melalui integrasi intelijen siber serta pembentukan tata kerja kolaboratif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk pelaksanaan operasi gabungan yang terukur. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan efek tangkal, mempercepat penanganan perkara, dan meningkatkan kapasitas respons Balai POM di Tarakan terhadap modus kejahatan yang terus berkembang. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan dengan melakukan koordinasi dengan Polda Kalimantan Utara, Kejati Kaltara, dan Korwas PPNS untuk memperlancar proses penyelesaian target perkara;
3. Intensifikasi pendampingan regulasi dan fasilitasi pemenuhan standar bagi pelaku usaha, dengan keberpihakan pada UMKM

sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Kalimantan Utara. Pendekatan dilakukan melalui program pendampingan terstruktur dan asistensi penerapan standar produksi yang baik guna mengawal mutu produk sejak dini. Strategi ini dirancang untuk mempercepat kepatuhan regulatori, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas akses pasar UMKM secara berkelanjutan. Kedepan, Balai POM di Tarakan terus menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor seperti DPMPTSP, Kelompok Masyarakat, dan Dinas Perdagangan sebagai upaya Balai POM di Tarakan dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat tiap tahunnya;

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk pembiasaan membaca label dengan metode CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar, dan Kadaluwarsa) serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran terhadap sediaan farmasi dan makanan, termasuk produk - produk ilegal yang beredar;
5. Penguatan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional serta keikutsertaan Balai POM di Tarakan dalam forum bilateral Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) yang relevan untuk menyinergikan pengawasan dan penindakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta memperkuat kapasitas respons melalui kerja bersama lintas sektor;
6. Balai POM di Tarakan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui partisipasi dalam pelatihan pengembangan kompetensi pada kegiatan terpadu yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan POM, serta melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian di bidang pemeriksaan dan pengujian produk sediaan farmasi dan

pangan olahan beredar. Di sisi lain, peningkatan kapasitas laboratorium dilakukan melalui rencana penerapan Sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 guna memastikan sistem manajemen mutu yang efektif, kompetensi teknis yang memadai, serta kemampuan menghasilkan data yang akurat, andal, dan diakui secara internasional. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melaksanakan analisis kebijakan pengawasan dan mendorong transformasi digital melalui pemanfaatan berbagai aplikasi yang disediakan oleh pengampu, termasuk Kementerian Keuangan, dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel;

7. Penguatan tata kelola dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem elektronik agar proses penyelenggaraan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini didukung dengan penambahan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian, serta akselerasi pelayanan publik berbasis elektronik melalui layanan ULPK via WhatsApp dan pendampingan pelaku UMKM melalui media daring (Zoom) untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat.

Tabel Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tarakan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan postmarket terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif berbasis risiko, termasuk pengawasan terhadap produk dan sarana tanpa izin edar, serta memberikan dukungan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi farmakovigilans, mengoptimalkan peran unit teknis dalam pengawasan lapangan, dan menjalin kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah maupun instansi vertikal untuk memperlancar pengawasan sarana produksi dan distribusi. Selain itu, Balai POM di Tarakan terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap produk berizin edar, serta memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pencegahan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO). Upaya ini juga mencakup pemberdayaan Tim Gerak Cepat (TGC) KLB Keracunan Pangan baik yang ada diinternal Balai POM di Tarakan maupun yang ada lintas sektor guna memastikan respon cepat terhadap insiden keracunan pangan, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan	Pencegahan dan deteksi dini dalam menekan kejahatan distribusi ilegal sediaan farmasi dan pangan olahan, baik melalui kanal daring maupun luring. Penindakan diperkuat melalui integrasi intelijen

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	siber serta pembentukan tata kerja kolaboratif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk pelaksanaan operasi gabungan yang terukur. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan efek tangkal, mempercepat penanganan perkara, dan meningkatkan kapasitas respons Balai POM di Tarakan terhadap modus kejahatan yang terus berkembang. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan dengan melakukan koordinasi dengan Polda Kalimantan Utara, Kejati Kaltara, dan Korwas PPNS untuk memperlancar proses penyelesaian target perkara.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pendampingan regulasi dan fasilitasi pemenuhan standar bagi pelaku usaha, dengan keberpihakan pada UMKM sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Kalimantan Utara. Pendekatan dilakukan melalui program pendampingan terstruktur dan asistensi penerapan standar produksi yang baik guna mengawal mutu produk sejak dini. Strategi ini dirancang untuk mempercepat kepatuhan regulatori, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas akses pasar UMKM secara berkelanjutan. Kedepan, Balai POM di Tarakan terus menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor seperti DPMPTSP, Kelompok Masyarakat, dan Dinas Perdagangan sebagai upaya Balai POM di Tarakan dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat tiap tahunnya.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Farmasi dan Pangan Olahan	masyarakat dalam pengawasan, termasuk pembiasaan membaca label dengan metode CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar, dan Kadaluwarsa) serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran terhadap sediaan farmasi dan makanan, termasuk produk - produk ilegal yang beredar.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional serta keikutsertaan Balai POM di Tarakan dalam forum bilateral Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) yang relevan untuk menyinergikan pengawasan dan penindakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta memperkuat kapasitas respons melalui kerja bersama lintas sektor.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Balai POM di Tarakan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui partisipasi dalam pelatihan pengembangan kompetensi pada kegiatan terpadu yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan POM, serta melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian di bidang pemeriksaan dan pengujian produk sediaan farmasi dan pangan olahan beredar. Di sisi lain, peningkatan kapasitas laboratorium dilakukan melalui rencana penerapan Sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 guna memastikan sistem manajemen mutu yang efektif, kompetensi teknis yang memadai, serta kemampuan menghasilkan data yang akurat, andal, dan diakui

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	secara internasional. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melaksanakan analisis kebijakan pengawasan dan mendorong transformasi digital melalui pemanfaatan berbagai aplikasi yang disediakan oleh pengampu, termasuk Kementerian Keuangan, dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan tata kelola dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem elektronik agar proses penyelenggaraan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini didukung dengan penambahan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian, serta akselerasi pelayanan publik berbasis elektronik melalui layanan ULPK via WhatsApp dan pendampingan pelaku UMKM melalui media daring (Zoom) untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Unit Kerja Balai POM di Tarakan juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengawasan Obat Dan Makanan

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Balai POM di Tarakan melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Utara”. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Tarakan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025 - 2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. Berikut di bawah ini target kinerja Balai POM di Tarakan periode Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,00	84,25	85,50	86,75	88,00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh	93,00	95,00	96,00	97,00	98,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	stakeholder					
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	89	90	91	92
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75	93,00	94,25	95,50	96,50
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,14	91,14	92,74	94,34	95,74

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	39,10	43,20	46,90	50,50	52,00
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,71	84,55	85,38	86,22	87,06

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
	Jumlah desa pangan aman	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,29	33,33	52,38	76,19	100,00
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	88,75	89,50	90,25	91,50	92,50
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
wilayah kerja UPT	standar					
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,55	4,60	4,65	4,70
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	82,00	83,00	84,00	84,5	85,00
	Nilai AKIP UPT BPOM	79,00	79,30	79,50	79,70	80,00
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,72	2,77	2,79	2,82	2,85

IV.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025 - 2029

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	4.292,4	4.580,7	5.038,7	5.542,6	6.096,9
Program Pengawasan Obat dan Makanan	9.604,2	6.342,8	6.977,1	7.674,8	8.442,2
Total	13.896,6	10.923,5	12.015,8	13.217,4	14.539,1

Kerangka Pendanaan Balai POM di Tarakan 2025 - 2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni	13.896,6	10.923,5	12.015,8	13.217,4	14.539,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
Total	13.896,6	10.923,5	12.015,8	13.217,4	14.539,1

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2025–2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Selain itu, penyusunan Renstra ini berpedoman pada Renstra BPOM Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang menjadi landasan perencanaan menengah dan tahunan di seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM.

Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2025–2029 menjadi pedoman kerja bagi seluruh unit di lingkungan Balai POM di Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pimpinan menegaskan agar pelaksanaan Renstra ini dilakukan secara akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil, dengan menumbuhkan sinergi antarunit serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Diharapkan setiap unit kerja mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab serta berkomitmen terhadap peningkatan kinerja lembaga, unit kerja, hingga pada level individu pegawai.

Selanjutnya, mekanisme evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala melalui pemantauan dan penilaian terhadap Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi tersebut mencakup analisis atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan serta digunakan untuk

perbaikan perencanaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program pada periode berikutnya.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memperkuat peran Balai POM di Tarakan dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI TARAKAN TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tarakan								13.896,6	10.923,5	12.015,8	13.217,4	14.539,1	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								9.604,1	6.342,8	6.977,1	7.674,8	8.442,2	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	83	84,25	85,5	86,75	88						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	(Balai POM di Tarakan	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	80	82	84	86	88						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	(Balai POM di Tarakan	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	85	87	89	92	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	(Balai POM di Tarakan	93	95	96	97	98						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	93	94	95	96	97						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	88	89	90	91	92						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	91.75	93.00	94.25	95.50	96.50						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	89,14	91,14	92,74	94,34	95,74						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	(Balai POM di Tarakan	91	92	93	94	95						UPT BPOM

[illegible]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	(Balai POM di Tarakan	-	-	-	-	-						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		(Balai POM di Tarakan	-	-	-	-	-						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE		(Balai POM di Tarakan											UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	(Balai POM di Tarakan	83,71	84,55	85,38	86,22	87,06						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	(Balai POM di Tarakan	7	8	9	9	9						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	(Balai POM di Tarakan	2	3	3	3	3						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	(Balai POM di Tarakan	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		(Balai POM di Tarakan	9.158	9.335	9.386	9.444	9.511						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		(Balai POM di Tarakan	24	9	10	11	12						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		(Balai POM di Tarakan	7	8	9	9	9						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		(Balai POM di Tarakan	2	3	3	3	3						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		(Balai POM di Tarakan	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		(Balai POM di Tarakan											UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	(Balai POM di Tarakan	14,29	33,33	52,38	76,19	100						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		(Balai POM di Tarakan	4	4	4	5	5						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		(Balai POM di Tarakan											UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	(Balai POM di Tarakan	88,75	89,5	90,25	91,5	92,5						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		(Balai POM di Tarakan	2	2	2	2	2						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		(Balai POM di Tarakan	90	91	92	93	94						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	(Balai POM di Tarakan	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		(Balai POM di Tarakan	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima		(Balai POM di Tarakan											UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	(Balai POM di Tarakan	4,51	4,55	4,6	4,65	4,7						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		(Balai POM di Tarakan	6	19	18	24	20						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		(Balai POM di Tarakan											UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	(Balai POM di Tarakan	82	83	84	84,5	85						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	(Balai POM di Tarakan	79	79,3	79,5	79,7	80						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	(Balai POM di Tarakan	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	(Balai POM di Tarakan	2,72	2,77	2,79	2,82	2,85						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		(Balai POM di Tarakan	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		(Balai POM di Tarakan	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		(Balai POM di Tarakan	9	9	9	9	9						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									4.292,4	4.580,7	5.038,7	5.542,6	6.096,9	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		(Balai POM di Tarakan	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		(Balai POM di Tarakan	1	1	1	1	1						UPT BPOM